

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

**SEMINAR NASIONAL
PENGAJARAN BUDAYA ALAM MINANGKABAU
(BAM)**

TEMA

**REVITALISASI NILAI-NILAI BUDAYA MINANGKABAU
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA MINANGKABAU
SEBAGAI PENGANTAR PEMBELAJARAN BAM**

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV.	
DI TERIMA TEL.	13-10-09
SUMBER/BAHASA.	Hd /
KOLEKSI	F1
NO. INVENTARIS	350/Hd/2009-S(1)
STAMPING	499-201 Agu '09

Dr. Agustina, M.Hum.

**PANITIA SEMINAR
KONSENTRASI PENDIDIKAN BUDAYA ALAM MINANGKABAU
JURUSAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
FAKULTAS BAHASA SASTRA SENI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2007**

BAHASA MINANGKABAU: KHASANAH BAM YANG 'TERLUPAKAN'

Jubel

Dr. Agustina, M.Hum.

1. Pendahuluan

Pemahaman terhadap budaya sering diartikan sebagai sesuatu yang hanya mengacu pada seni dan adat-istiadat; padahal lebih dari itu. Karena pemahaman yang terbatas itulah beberapa unsur yang terkandung dalam budaya ada yang tidak diketahui, bahkan tidak terjamah. Malah, unsur yang tidak terjamah itu semula hanya 'terlupakan', malah seiring dengan berjalannya waktu akhirnya dengan mudah 'dilupakan'.

Mengetahui apa hakikat dan unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan itu, amatlah perlu dalam memahami sebuah kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan, bahwa tinggi-rendahnya kadar kesadaran masyarakat Minangkabau yang memiliki, mempertahankan, dan memelihara kebudayaan sangat bergantung pula pada tinggi-rendahnya derajat perilaku masyarakat tersebut terhadap pemahaman makna budaya sebagaimana yang didefinisikan berikut, yaitu "*Culture is the integrated patterns of human knowlegde, belief, and behavior that depend upon man's capacity for learning and transmitting knowledge to succeeding generations*".

Setidaknya ada empat hal pokok yang terkandung dalam definisi itu, yaitu kita sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan harus: (1) memiliki pengetahuan dalam pengintegrasian unsur-unsur budaya, (2) meyakini dan menghargai unsur-unsur budaya, (3) mewujudkan pola perilaku yang menunjang butir (1) dan (2), dan (4) memiliki kemampuan untuk mempelajari dan mewariskan pengetahuan itu kepada generasi penerus.

Jika keempat hal pokok di atas sudah kita sadari sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan dalam bentuk ucapan dan tindakan, barulah sah menyandang sebuah predikat bahwa kita adalah 'bangsa atau suku bangsa yang berbudaya'.

2. Bahasa Minangkabau sebagai Unsur Budaya Minangkabau

Apabila kita memperhatikan definisi kebudayaan tersebut, jelaslah bahwa unsur-unsur kebudayaan tidak hanya terbatas pada seni (pertunjukan, tari, rupa, dan suara, dll.) adat-istiadat, tetapi juga mencakup bahasa.

Mengkaji bahasa Minangkabau sebagai salah satu unsur budaya Minangkabau, tampaknya perlu membuka mata dan telinga tentang fakta yang sesungguhnya sedang terjadi pada bahasa Minangkabau. Fakta itu adalah bahwa masyarakat suku bangsa Minangkabau 'belum bisa' dan 'belum mampu' menghormati dan memelihara bahasa Minangkabau sebagai unsur pengemban budaya Minangkabau itu sendiri. Fakta ini disimpulkan berdasarkan peran masyarakat sebagai pemilik dan pelaku budaya dalam memahami definisi kebudayaan di atas.

Ketidakmampuan itu dapat kita amati setidaknya dalam lima faktor dan kebijakan, yaitu (1) sikap pemilik dan pemakai bahasa tersebut, (2) kebijakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan pengajaran, (3) perhatian dan kebijakan pemerintah pusat tentang bahasa itu sebagai bahasa daerah, (4) program Balai Bahasa terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, dan (5) kebijakan pembangunan dalam mempertahankan ekologi alam dan sosial sehingga berdampak pada bahasa (lihat Wahab, 2002 :9).

2.1 Sikap Pemilik dan Pemakai Bahasa Minangkabau

Sikap pemilik dan pemakai bahasa Minangkabau di ranah tercinta ini, setuju tak setuju; mau tak mau, sudah bisa dikatakan bahwa 'tidak menampakkan sikap yang positif'. Hal ini terlihat mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga, sampai pada lingkungan

terbesar yaitu masyarakat. Di lingkungan rumah tangga misalnya, para orang tua tidak lagi menggunakan bahasa Minangkabau berkomunikasi dengan anak-anaknya. Hal ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Begitu juga di lingkungan masyarakat. Para orang dewasa agak canggung berkomunikasi menggunakan bahasa Minangkabau. Mereka lebih memilih dialek Jakarta atau bahasa Indonesia. Lebih-lebih para remaja, mereka hampir tidak mau menggunakan bahasa Minangkabau, tetapi lebih dominan menggunakan dialek Jakarta. Hal ini bisa dibuktikan pada kalangan anak muda dalam radio, malah "lebih Jakarta daripada di Jakarta itu sendiri". Fenomena ini menyiratkan bahwa: *jalan lah diasak dek rang lalu, cupak lah dituka dek rang panggaleh, tuan lah jadi tamu di rumah surang.*

Jika alasan tidak mau menggunakan bahasa Minangkabau disebabkan oleh ketidakmampuannya menguasai kaidah bahasa tersebut, ini tidak terlalu mencemaskan karena ada solusi untuk mempelajarinya. Tetapi, jika alasannya karena menganggap bahasa Minangkabau tidak bergengsi, kolot, kuno, dsb. sehingga merasa malu atau *kampungan*; maka ini perlu dicemaskan oleh semua kalangan. Mengapa demikian, karena alasan yang kedua adalah persoalan psikologis. Jika alasan psikologis yang membuat bahasa itu tergeser, bisa dikatakan bahwa "dalam satu atau dua generasi bahasa itu secara perlahan-lahan tapi pasti akan punah, alias mati" (Crowley, 1997). Lain halnya yang terjadi di Amerika bahwa pelarangan tentang penggunaan bahasa daerahnya bagi suku Indian lebih bersifat rasisme, sehingga bahasa itu dapat bertahan karena masih ada 'semangat dendam yang membara' bagi penuturnya untuk menggunakannya; meskipun secara sembunyi-sembunyi (Bjeljac-Babic, 2000). Dua situasi kebahasaan yang kontroversi, yaitu jika peminggiran terhadap bahasa Indian disebabkan oleh musuh yang jelas yaitu pemerintah Amerika, maka peminggiran terhadap bahasa Minangkabau musuhnya tidak jelas, tetapi ada di dalam masing-masing diri penuturnya, yaitu *musuah dalam salimuik.*

2.2 Bahasa Minangkabau dalam Pendidikan dan Pengajaran

Kurangnya penghormatan dan pemeliharaan bahasa Minangkabau sebagai bahasa pengantar pada dunia pendidikan dan pengajaran dapat dilihat pada kurang diberikan peluang secara transparan tentang dibolehkannya menggunakan bahasa Minangkabau pada kelas permulaan (I, II, dan III) di Sekolah Dasar (meskipun di dalam UUD 45 ditegaskan penggunaannya); sehingga tidak ada celah untuk dapat menggunakan bahasa Minangkabau di sekolah. Alasannya antara lain juga menyangkut persoalan 'gengsi' khususnya 'gensi sekolah', terutama bagi sekolah-sekolah yang berorientasi 'komersialisasi'. Atau, alasan lain, misalnya salah menafsirkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional di antara bahasa daerah dalam bidang pengajaran. Ini terbukti dari penelitian Moeliono (1985) bahwa hanya enam bahasa daerah, yaitu Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bali, dan Aceh, yang selama ini menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar di peringkat awal Sekolah Dasar di Indonesia.

Jika alasannya memang atau cenderung demikian, maka alangkah kelirunya pemahaman terhadap arti dan kedudukan bahasa Minangkabau sebagai bahasa daerah di antara bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. Bukankah penutur dwibahasawan atau multibahasawan yang baik adalah yang menggunakan dua atau lebih bahasa tersebut secara seimbang dan sejajar, sehingga tidak ada bahasa yang 'dikalahkan' dan yang 'mengalahkan'? Tidakkah seorang guru atau seorang pengambil kebijakan pendidikan tahu bahwa "yang paling ideal untuk belajar membaca dan menulis pada tingkat pemula ialah jika bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sudah dikuasai dengan baik secara lisan, sehingga jika dipaksakan pada bahasa yang belum mereka kuasai dengan sempurna akan membuat prestasinya rendah, putus asa, dan frustrasi (Trudell, 1993).

Sebagai ilustrasi, menarik juga disimak hasil penelitian Hagen dan Vallen (Steinhauer, 2000) tentang situasi belajar pada tingkat pertama di kota Kerkarde, Limburg, Jerman bahwa setiap tahun terjadi penurunan hasil belajar muridnya disebabkan oleh bahasa pengantar yang digunakan di sekolah berbeda daripada bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat, sehingga pemerintahnya mengubah kebijakan memberlakukan bahasa setempat sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran, dan ternyata hasil belajar muridnya sebaliknya

2.3 Bahasa Minangkabau sebagai Bahasa Daerah

Perhatian dan kebijakan pemerintah pusat tentang bahasa daerah sebagai bahasa Nusantara juga mengindikasikan adanya kurang menghormati dan menghargai. Begitu juga perhatian pemerintah daerah tentang bahasa Minangkabau. Ini tercermin pada kekeliruan memahami kebudayaan itu sendiri, yaitu lebih terbatas pada seni, sebaliknya mengalpakan masalah bahasa; seperti telah disinggung di awal tulisan ini. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan tentang pelestarian kebudayaan umumnya berhubungan dengan segala sesuatu yang disebut seni. Ini dapat dibuktikan bahwa sering diadakan pameran seni, pagelaran seni, baik itu seni tari, seni musik, seni suara, maupun seni pahat, seni ukir, dsb. Atau, juga sering disaksikan adanya acara Pekan Budaya yang menampilkan bermacam-macam prosesi upacara adat, dll. yang diadakan secara rutin.

Sebaliknya, tidak ada acara yang bersifat kebahasaan Minangkabau, misalnya Kongres Bahasa Minangkabau; seperti Kongres Bahasa Jawa dan Kongres Bahasa Sunda yang terjadi di daerah Jawa? Barangkali terlalu muluk jika mengidamkan acara tersebut. Malah acara yang bersifat penyuluhan atau pembelajaran bahasa Minangkabau bersifat khusus (di sekolah) tidak ada diprogramkan atau yang bersifat umum (untuk masyarakat) hampir tak ada disuarakan. Ini dapat dibuktikan, tak ada satupun koran lokal yang khusus berbahasa Minangkabau. Begitu juga radio dan televisi yang memang tidak ada yang khusus menggunakan bahasa Minangkabau sebagai media komunikasinya.

Semua fenomena ini perlu diakui bersama bahwa penyebabnya adalah tidak banyak yang mengetahui dan memahami bahwa masalah **penghormatan dan pemeliharaan terhadap bahasa Minangkabau sebagai bahasa daerah memerlukan undang-undang sebagai kekuatan hukum pengimplikasian dan perwujudannya.**

2.4 Peran Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Penghormatan dan pemeliharaan terhadap bahasa Minangkabau sebagai bahasa daerah oleh Pusat Bahasa lebih terlihat pada programnya di tahun 80-an sampai 90-an. Akan tetapi setelah itu sampai sekarang hampir tidak ada lagi kegiatan yang mengarah kepada hal demikian. Terlepas dari prioritas program atau segala sesuatu yang bersifat anggaran, yang jelas, seperti yang diungkapkan Wahab (2000) bahwa baik lewat jalur formal institusional akademis, jalur organisasi profesional, maupun jalur individu yang kompeten untuk membina, mengembangkan, dan memelihara bahasa daerah tidak terdengar lagi informasi tentang intensitas pada upaya yang lebih kongkret.

Namun, perlu pula diakui bahwa peran Pusat Bahasa tidak bisa dilepaskan daripada peran pemerintah. Keduanya saling terkait, karena dalam pendanaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (di Pusat) atau Balai Bahasa (di daerah) memang bergantung pada Pemerintah.

2.5 Arah dan Kebijakan Pembangunan

Pada kebijakan pembangunan juga terjadi kealpaan dalam menghormati dan memelihara bahasa daerah. Lebih dari tiga dekade terjadi kebijakan pembangunan yang salah arah sehingga berdampak pada kian bermunculannya masalah ekologi dan sosial yang melanda negeri ini, tak terkecuali daerah Minangkabau. Hal ini terlihat pada kemusnahan tidak hanya pada flora dan fauna, dan masyarakat adat; tetapi juga bahasa Minangkabau yang memiliki kandungan istilah-istilah flora, fauna, geografis, dan istilah upacara adat itu sendiri.

Sebagai contoh, mungkin tidak banyak masyarakat Minangkabau yang tahu lagi dengan kata *raia*, *togok*, *jigah*, dll. Begitu juga dengan beberapa nama flora dan fauna yang sudah susah dicarikan rujukannya karena sudah punah atau sudah menjadi barang langka sehingga tak mungkin ditemukan lagi oleh masyarakat. Penulisan nama geografis yang salah arah seperti *ikur koto* (seharusnya *ikua koto*), *Alang Lawas* (seharusnya *Alang Laweh*), *Lubuk Begalung* (seharusnya *Lubuak Bagaluang*), dan banyak lagi yang lain. yang

kenyataan penulisan dan penyebutannya ibarat "*ka ateh indak bapucuaq, kabawah indak baurek*" karena memang tidak bisa dikembalikan kepada kaidah, baik kaidah bahasa Minangkabau maupun kaidah bahasa Indonesia. Demikian juga dalam bidang pembangunan, khususnya pertokoan sehingga secara perlahan-lahan sudah menggeser pemakaian *lapau, kadai, pasa* menjadi *plaza, mol, pusat belanja*, dll.; pembangunan perumahan sehingga menggeser kata *pondok, dangau* menjadi *villa*, dll.

Fenomena seperti ini sudah berlangsung lama, entah sampai kapan ia dapat diakhiri. Apakah kita masih menunggu munculnya 'kesadaran' atau 'keintelektualan' masyarakat penuturnya tentang kepentingan bahasa Minangkabau, sehingga mereka dapat memahami dan mewujudkannya dalam bentuk perilaku? Yang jelas, jika tidak mau bahasa itu 'dilupakan', meskipun mulanya 'terlupakan', sudah sepatutnya peraturan perwujudannya yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang berkekuatan hukum segera direalisasikan oleh pihak-pihak yang berwenang.

3. Bahasa Minangkabau sebagai Sarana Pembelajaran BAM

Bahasa Minangkabau sebagai sarana pembelajaran BAM setidaknya dalam konteks ini dilihat dari dua sudut pandang, yaitu (1) sebagai media penyampai pesan (komunikasi) dan (2) sebagai materi pembelajaran.

3.1 Bahasa Minangkabau sebagai Media Berkomunikasi

Pernahkah disadari bahwa jika kita sebagai orang Minangkabau sedang dilanda emosi --apa itu marah atau senang—hampir boleh dikatakan selalu mengungkapkan atau mengekspresikannya dalam bahasa Minangkabau, meskipun ketika itu sedang berkomunikasi dalam bahasa kedua (bahasa Indonesia). Ini menandakan bahwa 'rasa bahasa' bahasa pertama atau bahasa ibunya bagi seseorang akan berbeda daripada rasa bahasa keduanya. Hal ini bukanlah mengada-ada, namun memang secara psikolinguistik, sosiolinguistik, dan pragmatis dikarenakan bahwa semua yang dirasakan lebih tuntas tersampaikan, lebih tepat sasarannya, dan bahkan lebih cocok situasinya dengan bahasa ibunya. Artinya, perlu disadari bahwa tidak semua tujuan komunikasi dapat dicapai melalui media bahasa kedua.

Berdasarkan fenomena itulah, sangat diperlukan sekali bahwa pembelajaran BAM disampaikan dengan media BAM itu sendiri, yaitu bahasa Minangkabau. Alasannya adalah karena tidak semua konsep, gagasan, dan keinginan dapat diwakili dengan bahasa lain jika penuturnya memang menginginkan hasil yang tepat guna. Selain itu, seperti yang disampaikan oleh Dahrizal (Padek, 15 Juli 2007) dengan menggunakan bahasa Minangkabau materi pengajaran dan pesan yang diinginkan bisa sampai (komunikatif). Bagaimana mungkin bisa mencari padanan istilah *induk bako, anak pisang, kato malereang, saluak, sumbang, ratok* dll. dalam bahasa Indonesia karena makna yang dikandungnya tidak sekedar bersifat leksikal dan gramatikal tetapi juga sosio-pragmatikal. Itulah sebabnya jika orang asing mempelajari suatu budaya tertentu, terlebih dahulu ia mempelajari bahasa yang digunakan dalam budaya itu.

Banyak kalangan orang tua yang tidak puas dengan nilai mata pelajaran BAM yang diperoleh anak-anaknya. Mereka umumnya tidak menyadari bahwa penyebab utamanya adalah bahasa yang digunakan dalam pembelajaran BAM itu sendiri. Selama ini pembelajaran BAM ibarat sebuah '*dubbing*' melalui bahasa Indonesia, sehingga nilai-nilai lokal yang lebih spesifik dan unik ditafsirkan dan/atau dimaknai sebagai nilai-nilai yang umum.

Jika di sebuah negara maju seperti Jerman, tepatnya di kota Kerkerde, Limburg seperti dijelaskan di atas pemerintahnya memberlakukan bahasa daerah penduduk setempat sebagai bahasa pengantar dalam semua mata pelajaran di tingkat permulaan, maka 'sangat masuk akal' jika di Sumatera Barat pemerintahnya juga memberlakukan bahasa Minangkabau menjadi bahasa pengantar (hanya) dalam pembelajaran BAM.

3.2 Bahasa Minangkabau sebagai Materi Pembelajaran BAM

Banyak kalangan dengan bijak mengkritik pemakaian bahasa Minangkabau seseorang, namun setelah dia menggunakannya ternyata si pengkritik itu sendiri juga 'tidak mampu' memakaikannya pada forum atau situasi formal (kecuali dalam situasi sehari-hari yang bersifat nonformal). Kenyataan itu ibarat *si bisu barasian; takana lai takatoan indak*. Ini adalah pertanda bahwa untuk penggunaan pada situasi formal dan bersifat ilmiah orang Minangkabau butuh 'belajar (kaidah)' bahasa Minangkabau itu sendiri, antara lain orang dewasa: para orang tua, guru, pejabat, dan mungkin juga *niniak mamak* dan *bundo kanduang*. Apalagi, anak-anak dan remaja yang memang menjadi sasaran pembelajaran BAM itu sendiri yang memang baru *baumua satahun jaguang badarah satampuak pinang*, yang hanya mewarisinya dari orang tua dan orang di sekitarnya yang memang juga belum tentu mempunyai kemampuan berbahasa Minangkabau yang baik dan benar. Tentu saja lebih dari fenomena yang dialami oleh sederetan orang dewasa yang disebutkan tadi. Fenomena ini juga menjadi biang keladi ketidakberhasilan pembelajaran BAM selama ini karena media bahasa penyampainya memang belum dan/atau sudah tak dikuasai lagi.

Bagaimana mungkin murid kelas III SD dapat memahami apa yang dimaksud dengan kata *basikasek*, *basikasa*, *basisalak* jika mereka tidak mengetahui arti dan makna morfem bebas yang terikat *basi*. Mereka bisa saja memahami *basi* dalam arti 'besi' dan *rasan*. Padahal *basi* di sini sesuatu yang dilakukan oleh dua pihak, bersama-sama, timbal balik; ibarat *indak bisa batapuak sabalah tangan*. Begitu juga dengan kata *kasek*, *kasa*, dan *salak* yang dapat dipahami secara leksikal sebagai *sesuatu yang tidak licin, tidak mulus*, dan *gonggongan anjing*, padahal yang dimaksud sebaliknya, yaitu makna konotatif dan emotif: Jika mereka sudah memahami kata *basi* dalam konteks kalimat itu sebagai penanda aktivitas yang saling melakukan (resiprokal) tentu akan dengan mudah guru menggiring pengaplikasiannya dalam membentuk budi pekerti yang baik, karena mereka dapat memahami bahwa perbuatan-perbuatan tidak baik seperti itu tak akan terjadi jika sesamanya saling mengalah. Demikian juga halnya dengan kaidah kecil lainnya, namun menentukan; misalnya penggunaan *di* sebagai awalan (prefiks) dan *di* sebagai kata depan (preposisi) yang akhirnya dapat menggiring anak didik membedakan konsep aktivitas dengan tempat, jarak, arah, dsb.

Dengan mempelajari kaidah bahasa (yang sesuai dengan gradasi materi dan tingkatan umur siswa) juga akan tumbuh kecintaan mengaplikasikannya dalam berbagai fungsi komunikasi. Pertama, dalam fungsi ekspresif misalnya, siswa dapat mengungkapkan dan menggambarkan perasaannya dengan berorientasi kepada mitra tuturnya: orang tua, guru, *mamak*, *etek*, *uni/uda*, atau *adiak*. Pemahaman akan *kato nan ampek*, sering diartikan hanya sebatas siapa mitra bicara (besar, kecil, sebaya, ipar-besan) sehingga yang lebih dari itu mereka tidak menggunakannya lagi; padahal juga menyangkut situasi pembicaraan (resmi, bergurau, duka, dll.). Kedua, fungsi fatis dapat dimanfaatkan dalam memelihara hubungan sosial guru dan murid atau orang tua dan anak. Betapa banyak unsur-unsur fatis bahasa Minangkabau, yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sosial, misalnya *Baa kaba, Pak ?*; *O, si Anu, bilo pulang ?*; *Bara urang anak?*; dll. dalam bertegur sapa meskipun hanya sebagai basa-basi, namun menciptakan suasana keakraban dan saling menghargai/menghormati sehingga memantapkan keberterapan dan keberlangsungan komunikasi sosial. Begitu juga unsur-unsur lain, seperti *Iyo mah, indak ado do(h)*; *datang selah bisuak*; *Ano urang siko tuh/duh*, dll. yang tanpa unsur fatis (bergaris bawah) pembicaraan akan terasa kaku, ketus, dan bahkan menjadi kasar (Agustina, 2004). Ketiga, fungsi estetis yang dapat bertujuan memupuk daya kreativitas anak sehingga mereka mampu mengekspresikan pikiran, gagasan, perasaan ke dalam sebuah wacana, sekalian membentuk kepribadian yang halus dan santun. Keempat, fungsi direktif yang dapat menuntun perilaku guru dan murid atau anak dan orang tua yang ujung-ujungnya berimplikasi pada pergaulannya dalam masyarakat, baik secara lokal dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri, maupun secara nasional dalam pergaulan antaretnis dan bernegara. Terakhir, fungsi informatif yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan pada murid sehingga murid mantap menatap hidup ini dengan segala bekal pengetahuan yang telah ditransferkan kepada mereka.

Banyak lagi pengaplikasian kaidah-kaidah kebahasaan yang semestinya diajarkan melalui pembelajaran BAM, seperti pengaplikasian tata bahasa dan makna (semantik) yang tak mungkin dijejalkan di sini secara satu persatu. Yang jelas ada dua pilihan dalam bidang ini, yaitu (1) apakah bahasa Minangkabau diajarkan bersamaan dalam pembelajaran BAM atau (2) bahasa Minangkabau diajarkan secara tersendiri atau terpisah dari pembelajaran BAM. Keduanya sama-sama memungkinkan. Jika pilihan pertama yang diikuti, ini dapat dilakukan karena berdasarkan pengradasian materi yang terdapat dalam buku-buku pembelajaran BAM selama ini, materinya sangat padat sehingga masih dapat memvariasikannya dengan materi bahasa Minangkabau. Jika pilihan kedua yang dipilih, juga sangat memungkinkan karena ini menyangkut kebijakan pihak berwenang menambah sebuah mata pelajaran muatan lokal lagi. Meskipun yang kedua agak ruwet dibanding yang pertama, namun demi sebuah aset budaya --jika masyarakat Minangkabau memang ingin disebut sebagai 'suku yang berbudaya'-- ; tentu saja *di hati mati di mato buto*.

4. Penutup

Jika beberapa elite Minangkabau pada lokakarya RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yang diadakan di Bukittinggi baru-baru ini mencemaskan bahwa 'adat Minangkabau akan punah' (Padek, 21 Juli 2007), maka kaum akademisi pun mencemaskan pula bahwa 'bahasa Minangkabau juga akan punah'.

Kecemasan tersebut sangat beralasan, sebab ciri-ciri sebuah bahasa akan punah atau mati, di antaranya berdasarkan penelitian Gunarwan (1994) terhadap bahasa Lampung adalah jika kenyataannya hanya penutur yang berusia 51 tahun ke atas yang masih murni menggunakan bahasa tersebut di lingkungan rumah, sedangkan yang berumur 41-50 tidak selalu demikian. Selanjutnya, makin muda usia penutur makin tinggi kemungkinan tidak menggunakannya, dan umumnya alasan tidak menggunakan tersebut adalah psikologis, yaitu merasa malu, kurang bergengsi, dan istilah lain yang sejenis. Meskipun secara teoretis bahasa yang berpenutur di 100.000 akan selamat dari keterancaman kepunahan, namun karena 'malu' atau 'gengsi' sebagai alasan tidak menggunakan bahasa tersebut, maka secara kajian sosiolinguistik Gunarwan (2000) menyimpulkan bahwa bahasa Lampung dapat punah dalam perkiraan waktu 75--100 tahun lagi.

Tampaknya, perlu direnungkan catatan UNESCO bahwa sepuluh bahasa mati setiap tahun di dunia dan diperkirakan dalam abad ini 50--90 % dari bahasa yang dituturkan (dipakai) saat ini akan punah (Bjeljac-Babic, 2000). Selain itu, perlu juga diketahui bahwa dari 6703 bahasa yang ada di dunia (Grimes, 1996), di antaranya 706 berada di Indonesia (urutan ke-2 di dunia dari segi jumlah terbanyak) --248 terdapat di Irian Jaya (Grimes dalam Steinhauer, 1995). Dari 706 bahasa yang ada di Indonesia itu, bahasa Minangkabau menempati urutan ke-5 dari segi jumlah penutur (Moeliono, 1995).

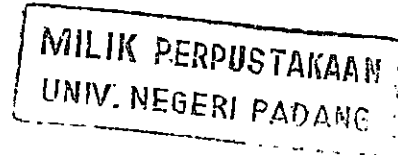
Jika direnungkan hasil penelitian dalam bahasa Lampung tersebut, bukankah situasi yang sama juga terjadi dalam bahasa Minangkabau? Akankah dibiarkan nasib bahasa Lampung juga menimpa nasib bahasa Minangkabau --yang termasuk 10 besar di Indonesia, yaitu peringkat ke-5?

Jika jawabannya tidak, marilah kita *saayun salangkah, sairiang sajalan, tabang sapulun, inggok sacakam* bersama-sama menghormati dan memelihara Bahasa Minangkabau tidak hanya sebatas ucapan atau 'retorika', tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perilaku dan undang-undang, di antaranya dalam lima lini, yaitu: (1) memperbaiki sikap penutur dan pemilik bahasa Minangkabau, (2) menghidupkan kembali fungsi bahasa Minangkabau sesuai dengan orientasinya, di antaranya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran BAM, mendorong lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk memperhatikan perwujudan terciptanya undang-undang yang menyangkut kebijakan tentang pemeliharaan dan penghormatan terhadap bahasa Minangkabau sesuai dengan proporsinya, (3) mendorong Balai bahasa untuk menyosialisasikan program-program yang menyangkut penghormatan dan pemeliharaan bahasa Minangkabau, dan (5) memulihkan ekologi alam dan sosial yang menjadi tempat digunakannya bahasa Minangkabau beserta adat-istiadatnya.

Sebaliknya, dalam kaitannya dengan pembelajaran BAM, tak bisa disangkal lagi bahwa penggunaan bahasa Minangkabau sebagai media penyampaiannya dianggap sudah

'sangat perlu dan mendesak'. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bahasa Minangkabau tidak bisa dipisahkan dari budaya Minangkabau. Kepentingan keduanya ibarat "melihat mata uang dari dua sisi yang berbeda, di satu sisi adalah budaya Minangkabau, di sisi satu lagi adalah bahasa Minangkabau".

*Ilalang tumbuahnyo pendek
Dipangga dek rang Tarusan
Ambo bilang sado nan dapek
Kalau salah mohon dimaafkan*



Kepustakaan

- Agustina. 2004. "Ungkapan Fatis dalam Bahasa Minangkabau" dalam *Ungkapan Fatis dalam Pelbagai Bahasa*. Hermina Sutami (Penyunting). Publikasi Pusat Leksikologi dan Leksikografi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Jakarta : Rumah Printing.
- Bjeljac-Babic, Ranka. 2000. "6.000 Languages: An Embattled Heritage", [http: www. Org.courier/ 2000_04/uk/ doss01.htm](http://www.Org.courier/2000_04/uk/doss01.htm)
- Crowley, Terry. 1997. *An Introduction to Historical Linguistics*. Edisi ke-3. Aucklland: Oxford University Press.
- Grimes, Barbara F. (Ed) 1996. *Ethnologue: Languages of the World...* Edisi ke-13. Summer Institute of Linguistics.
- Gunarwan, Asim. 1994. "The Encroachment of Indonesian Upon the Home Domain of the Lampung Languages Use: A Case Study of the Possibility of a Minor-Language Shift". Makalah Konferensi Internasional VII Linguistik Austronesia, Leiden, 22-27 Agustus 1994.
- , 2000. "Peran Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa", Kaswanti Purwo (ed.) 2000, 51-57.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- , 1995. "Pertembungan Bahasa dan Jati Diri" dalam *Temu Bahasa dan Sastra Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian Bahasa, 25 Oktober 1995.
- Steinhauer, Hein. 1995. "Struktur Verba Bahasa Nimboran", *Linguistik Indonesia* 13.1 dan 2 (Juni dan Desember 1995), 1-23.
- , 2000. "Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah di Indonesia", Kaswanti Purwo (ed.) 2000, 175-195.
- Trudell, Barbara. 1993. *Beyond the Bilingual Classroom: Literacy Acquisition Among Peruvian Amazon Communities*. Dallas (TX): SIL.